

**KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN ( SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT  
BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh**

**DWI WAHYUNI KUSUMA RAHARJA**  
**NIM : C. 100.000.128**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram. Maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan hukum pidana. Menurut pendapat dari D. Simons (Utrecht) bahwa:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>1</sup>

Didalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemuka pengadilan dan dipidana. Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal: 7

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya. Pengertian sistem peradilan pidana menurut pendapat M. Faal:

Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan, bersalah atau tidak bersalah terdakwa di depan persidangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP, bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di persidangan, hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal: 24

<sup>3</sup> Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 9

Pada proses penyelesaian terhadap tindak pidana, pembuktian sangat erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan persidangan, ternyata tersangka atau saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara pemeriksaan (BAP) atau tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa seorang terdakwa tersebut mencabut pernyataan, misalnya: adanya unsur ancaman atau paksaan dari pihak penyidik ketika melakukan pemeriksaan, atau juga karena perlakuan yang semena-mena pada waktu penyidikan sehingga dalam memberikan pernyataan, terdakwa atau saksi tidak leluasa atau merasa tertekan, yang jelas kemudian adanya hal-hal di atas justru penyidikan dalam rangka mencari keterangan akan tindak pidana yang dilakukan menjadi bias atau kurang jelas. Jelas ini sangat melanggar ketentuan aturan yang berlaku, karena sekalipun dalam proses pemeriksaan, hak-hak asasi tersangka atau terdakwa harus tetap dilindungi.

Untuk mengatasi hal tersebut, tidak kemudian pemeriksaan berhenti di situ saja. Untuk membuktikan apa yang dilakukan terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam BAP tersebut, baik penuntut umum maupun hakim juga sering menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan sering disebut dengan saksi *verbalisant* (saksi penyidik).

Saksi *verbalisant* tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHP), namun penggunaan saksi *verbalisant* ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi *verbalisant* dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi *verbalisant* atau saksi penyidik.

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi *verbalisant* ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen di mana hakim membentuk keyakinan atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi *verbalisant* ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Namun keberadaan atau sejauh mana kekuatan pembuktian pernyataan saksi *verbalisant* dalam mempengaruhi keyakinan hakim tidak mempunyai parameter yang pasti.

Penelitian ini bertolak dari permasalahan penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) sebagai alat bukti tindak pidana dalam proses pemeriksaan persidangan di Indonesia, dengan objek dari penelitian ini adalah pernyataan dari saksi *verbalisant* dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Untuk selanjutnya, pembahasan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pernyataan dari saksi *verbalisant* dapat dijadikan alat bukti. Selain itu dari penelitian ini akan terlihat sikap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mempergunakan alat bukti yang ada. Berawal dari permasalahan tersebut di atas, disini Penulis tertarik untuk mencoba mengangkatnya dalam sebuah Penulisan Hukum dengan judul: **“KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam persidangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini penulis bagi dalam dua kelompok sebagai berikut:

### 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui praktik penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam persidangan.

### 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai ilmu hukum khususnya hukum acara pidana terutama mengenai kedudukan saksi *verbalisan* (Saksi Penyidik) sebagai alat bukti di persidangan dalam pembuktian perkara pidana.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu informasi yang rinci dan lengkap serta terarah yang memberikan jawaban atas permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, terutama mengenai kedudukan saksi *verbalisant* (Saksi Penyidik) sebagai alat bukti di persidangan dalam pembuktian perkara pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.<sup>4</sup> Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>5</sup>

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode

---

<sup>4</sup> Winarno Soerakhmat. 1982. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito. Hal: 131

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research. Jilid 3*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Hal: 4



ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber data dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian diperoleh alur peristiwa secara kronologis mengenai proses penggunaan saksi *verbalisant* dalam perkara yang diteliti kemudian menilai sebab akibat dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali sehingga memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>7</sup> Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Hal: 32

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Op. Cit.* Hal: 250.

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Boyolali telah menangani kasus tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dan dalam proses pemeriksaan di persidangan dihadirkan saksi *verbalisant* untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah tentang praktik penggunaan saksi *verbalisant* mulai dari pemeriksaan sampai dengan putusan di Pengadilan Negeri Boyolali.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen, koran, internet, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang diteliti Penulis.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal: 26

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, *Pertama* sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari Pengadilan Negeri Boyolali. *Kedua*, sumber data sekunder yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder, yaitu: hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yaitu: bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal: 12.

## 6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>10</sup>

Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.<sup>11</sup> Tiga tahap tersebut adalah:

### a. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

### b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan tabel dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Lexy J. Maleong. 2002. *Op. Cit.* Hal: 103.

<sup>11</sup> HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal: 35.

c. Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan<sup>12</sup>.

Ketiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi dimulai dengan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan dengan verifikasi sehingga akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang diperinci bab demi bab sebagai berikut:

Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan penguraian mengenai tinjauan pustaka, yang menjelaskan mengenai tinjauan mengenai sistem peradilan pidana, teori pembuktian, tinjauan tentang alat bukti dan tinjauan tentang alat bukti saksi.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal: 37.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai deskripsi kasus tindak pidana perjudian yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali. Penulis kemudian menelaah dan membahas hasil penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan berupa praktek penggunaan saksi *verbalisan* (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam persidangan.

Bab IV merupakan jawaban atas rumusan permasalahan dalam bentuk kesimpulan yang merupakan hasil dan telaah dan pembahasan dalam bab sebelumnya. Penulis kemudian dengan kesimpulan tersebut menyampaikan saran-saran untuk permasalahan tersebut.